

**LAPORAN TRANSPARANSI  
PELAKSANAAN TATA KELOLA  
PT. BPR CAHAYA FAJAR  
TAHUN 2025**



**JL. Karanggetas No. 142 Cirebon  
TELEPON: (0231) 248400 / (0231) 248600**

## 1. Penjelasan Umum Penerapan Tata Kelola

Informasi Umum BPR	
Nama BPR/BPRS	BPR Cahaya Fajar
Alamat	Jl Karanggetas Nomor 142 Kota Cirebon
Nomor Telepon	0231248222

### Penjelasan Umum:

Tata kelola yang baik merupakan unsur penting di dalam industri Perbankan mengingat risiko dan tantangan yang dihadapi oleh industri perbankan yang semakin meningkat. Penerapan Tata Kelola yang baik dan konsisten akan memperkuat posisi daya saing Bank, memaksimalkan nilai Bank, mengelola sumber daya dan risiko secara lebih efisien dan efektif, yang pada akhirnya akan memperkokoh kepercayaan Pemegang Saham dan masyarakat sehingga Bank dapat beroperasi dan tumbuh secara berkelanjutan dalam jangka panjang.

Untuk mewujudkan terlaksananya Prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik, maka PT. BPR Cahaya Fajar mengupayakan penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan dalam pengelolaan Bank sehari-hari dengan berlandaskan pada lima prinsip dasar, yaitu :

1. Keterbukaan(Transparency), yaitu keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan serta keterbukaan dalam pengungkapan dan penyediaan informasi yang relevan dan mudah diakses oleh pemangku kepentingan.
2. Akuntabilitas (Accountability), yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ BPR sehingga pelaksanaan tugas dilakukan secara optimal dan dapat dipertanggungjawabkan secara utuh.
3. Tanggung Jawab (Responsibility), yaitu kesesuaian pengelolaan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan nilai etika serta standar, prinsip, dan praktik yang berlaku.
4. Independensi (Independency), yaitu keadaan yang dikelola secara mandiri dan profesional serta bebas dari benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan nilai etika serta standar, prinsip, dan praktik.
5. Kewajaran (Fairness), yaitu kesetaraan, keseimbangan, dan keadilan di dalam memenuhi hak pemangku kepentingan yang timbul berdasarkan perjanjian, ketentuan peraturan perundangundangan, dan nilai etika serta standar, prinsip, dan praktik.

### Ringkasan Hasil Penilaian Sendiri atas Penerapan Tata Kelola

Peringkat Komposit Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Tata Kelola	<b>2. Baik</b>
--	----------------

### Penjelasan Peringkat Komposit Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Tata Kelola:

Manajemen BPR Cahaya Fajar telah melakukan pelaksanaan tata kelola yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip tata kelola. Dalam hal terdapat kelemahan pelaksanaan prinsip

tata kelola, secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen BPR.

## 2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

<b>1.</b>	<b>Nama</b>	<b>Robby Santoso</b>
	<b>Penjelasan Tugas dan Tanggung Jawab:</b>	
	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Memimpin dan mengkoordinasikan anggota direksi lainnya, guna mewujudkan visi dan misi PT. BPR cahaya Fajar.</li><li>2. Memahami dan mematuhi peraturan dari regulator (BI, OJK dan lainnya) serta aturan internal.</li><li>3. Menyelenggarakan perencanaan dan koordinasi dalam pelaksanaan tugas Direksi serta melakukan pembinaan dan pengendaliannya.</li><li>4. Menjaga agar pelaksanaan operasional sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.</li><li>5. Menyusun dan menjalankan rencana strategi dan anggaran tahunan yang sudah disetujui oleh Dewan Komisaris.</li><li>6. Penetapan kebijaksanaan untuk melaksanakan pengurusan dan pengelolaan berdasarkan kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris.</li><li>7. Penyusunan dan penyampaian Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran kepada Dewan Komisaris yang meliputi kebijaksanaan di bidang organisasi, perencanaan perkreditan, keuangan, kepegawaian umum dan pengawasan untuk mendapatkan pengesahan.</li><li>8. Penyusunan dan penyampaian laporan tahunan kepada Dewan Komisaris untuk mendapatkan pengesahan.</li><li>9. Melaksanakan pengawasan terhadap penerapan APU PPT dan PPSPM atau pengawasan terhadap serangkaian pengaturan dan proses pelaksanaan upaya pencegahan dan pemberantasan TPPU dan TPPT.</li><li>10. Bersama Direksi lain yang berada dibawahnya menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan rencana kerja terhadap rencana kerja kepada OJK.</li><li>11. Memastikan terlaksananya penerapan Tata Kelola yang baik pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh jajaran organisasi.</li><li>12. Menyetujui kebijakan dan prosedur perkreditan serta melakukan pengawasan aktif terhadap pelaksanaan kebijakan perkreditan.</li><li>13. Melakukan pengawasan terhadap perbaikan/ penyelesaian temuan hasil pemeriksaan otoritas pengawasan Bank atau pemerintah.</li><li>14. Melakukan pembinaan dan menilai prestasi kerja seluruh pegawai yang berada dibawahnya.</li><li>15. Memimpin dan mengkoordinir SKAI dan pelaksanaan pengawasan kegiatan operasional bank.</li><li>16. Membuat keputusan dalam hal memberikan jumlah pinjaman kepada calon nasabah yang masuk dalam batas wewenang.</li></ol>	
<b>2.</b>	<b>Nama</b>	<b>Feby Fernady Masura</b>
	<b>Penjelasan Tugas dan Tanggung Jawab:</b>	
	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Memahami dan mematuhi peraturan dari regulator (BI, OJK dan lainnya) serta segala aturan yang dibuat oleh perusahaan.</li></ol>	

2. Bertanggungjawab atas penghimpunan dana dan penyaluran dana kepada masyarakat.
3. Menetapkan, memutuskan, dan menyetujui, serta memerintahkan pembayaran dalam rangka realisasi kredit.
4. Menetapkan cara-cara penagihan kembali atas kredit yang telah diberikan kepada debitur yang menunggak secara efektif dan efisien.
5. Bertanggung jawab atas pengaduan, penanganan, dan penyelesaian keluhan/ pengaduan nasabah.
6. Memantau kondisi internal (Kekuatan dan kelemahan bank) dan perkembangan kondisi eksternal yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi strategi usaha bank.
7. Bersama Direksi lain menyusun dan Menyampaikan laporan pelaksanaan rencana kerja terhadap rencana kerja kepada Otoritas jasa keuangan.
8. Menyetujui kebijakan dan prosedur perkreditan serta melakukan pengawasan aktif terhadap pelaksanaan kebijakan perkreditan.
9. Melakukan pengawasan terhadap perbaikan/ penyelesaian temuan hasil pemeriksaan otoritas pengawasan Bank, pemerintah dan audit internal.
10. Melakukan pembinaan dan menilai prestasi kerja seluruh pegawai yang berada dibawahnya.
11. Melaksanakan koordinasi penyusunan, perencanaan & pengendalian, evaluasi serta pembinaan thd kegiatan Operasional.
12. Mengawasi & menganalisis posisi neraca utk tujuan pengendalian keuangan.
13. Meneliti, memeriksa & menandatangani persetujuan biaya.
14. Melaksanakan pengawasan terhadap penerapan APU PPT dan PPSPM/ pengawasan terhadap serangkaian pengaturan dan proses pelaksanaan upaya pencegahan dan pemberantasan TPPU dan TPPT.

**3.**
**Nama**
**Gunadi**
**Penjelasan Tugas dan Tanggung Jawab:**

1. Memahami & mematuhi peraturan dr regulator & internal.
2. Memantau & menjaga kepatuhan BPR thd seluruh komitmen yg dibuat.
3. Penyelenggaraan tata kerja & prosedur unit kerja.
4. Pengawas & pengarah serta evaluator & pengendalian seluruh kegiatan operasional sesuai dengan regulator.
5. Bertanggung jawab atas pengaduan, penanganan & penyelesaian pengaduan nasabah.
6. Bersama Direksi lain menyusun & menyampaikan lap pelaksanaan rencana kerja thd rencana kerja kepada OJK.
7. Mengawasi & menganalisis posisi neraca utk tujuan pengendalian keuangan.
8. Melakukan pengawasan thd perbaikan / penyelesaian temuan pemeriksaan.
9. Mengusulkan / merekomendasikan kpd DirUt utk melakukan promosi, mutasi & demosi karyawan.
10. Meneliti, memeriksa & menandatangani persetujuan biaya.
11. Menetapkan langkah untuk memastikan BPR telah memenuhi regulator dalam rangka pelaksanaan prinsip kehati-hatian termasuk memberi pendapat yg berbeda bila terdapat kebijakan yg menyimpang dari regulator.
12. Memastikan terlaksananya sosialisasi & pelatihan berkelanjutan kpd unit kerja mengenai peraturan OJK terkini & peraturan lain yang relevan.

13. Melaporkan kpd Direksi lainnya & Komisaris secara tertulis terkait pelanggaran kepatuhan yang dilakukan oleh pegawai BPR.
14. Melaporkan kpd Dewan Komisaris secara tertulis terkait pelanggaran kepatuhan yang dilakukan oleh Direksi.
15. Memastikan seluruh karyawan BPR memahami & mengimplementasikan manajemen risiko.
16. Bersama Direksi lain menyusun & menyampaikan laporan pelaksanaan rencana kerja terhadap rencana kerja kepada OJK.
17. Melakukan pengawasan thd perbaikan/ penyelesaian temuan hasil pemeriksaan otoritas pengawasan Bank / Pemerintah.
18. Melaksanakan pengawasan terhadap penerapan APU PPT dan PPSPM / pengawasan terhadap serangkaian pengaturan dan proses pelaksanaan upaya pencegahan dan pemberantasan TPPU dan TPPT.
19. Melakukan pembinaan dan menilai prestasi kerja seluruh pegawai yang berada dibawahnya.

#### Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris:

1. Penyelesaian kredit bermasalah.
2. Pengkinian Ketentuan Internal sesuai Regulator yang berlaku.
3. Penerapan POJK terbaru terhadap pelaksanaan kegiatan operasional Bank.

### 3. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris

1.	Nama	Widodo
<p><b>Penjelasan Tugas dan Tanggung Jawab:</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Memastikan terselenggaranya pelaksanaan penerapan tata kelola dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.</li><li>2. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Anggota Direksi dan memberikan nasihat kepada Direksi.</li><li>3. Mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis.</li><li>4. Menyelenggarakan rapat Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 bulan dan dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris baik dihadiri langsung, telekonferensi atau video konferensi dengan minimal agenda rapat sesuai POJK.</li><li>5. Menyelenggarakan rapat dengan agenda penetapan rencana bisnis BPR wajib dilaksanakan minimal 1 (satu) kali dalam setahun dan wajib dihadiri secara langsung oleh seluruh anggota dewan komisaris.</li><li>6. Melaksanakan pengawasan terhadap penerapan APU PPT dan PPPSPM atau pengawasan terhadap serangkaian pengaturan dan proses pelaksanaan upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme (TPPU dan TPPT).</li><li>7. Memimpin jalannya Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan.</li><li>8. Menyetujui kebijakan dan prosedur perkreditan serta melakukan pengawasan aktif terhadap pelaksanaan kebijakan perkreditan.</li><li>9. Memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari SKAI, auditor eksternal, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan atau pengawasan otoritas lainnya.</li><li>10. Menyusun dan melakukan evaluasi secara berkala kebijakan remunerasi dan nominasi bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, dan mengusulkan</li></ol>		

penetapan kebijakan dimaksud kepada RUPS.

11. Memastikan Direksi menyusun kebijakan dan prosedur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
12. Melakukan pengawasan atas penerapan kebijakan dan prosedur pengendalian internal dalam proses pelaporan keuangan Bank.

2.	Nama	Soenaryo Halim
----	------	----------------

**Penjelasan Tugas dan Tanggung Jawab:**

1. Melaksanakan tanggung jawabnya sebagai Komisaris dalam membantu tugas Komisaris Utama.
2. Membantu Komisaris Utama dalam memastikan terselenggaranya pelaksanaan penerapan tata kelola dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
3. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Anggota Direksi dan memberikan nasihat kepada Direksi.
4. Mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis.
5. Membantu Komisaris Utama dalam melakukan pengawasan terhadap perbaikan/ penyelesaian temuan hasil pemeriksaan otoritas pengawasan Bank atau pemerintah.
6. Memberikan penilaian dan evaluasi atas neraca dan perhitungan laba/rugi tahunan, serta laporan-laporan berkala lainnya yang disampaikan oleh Direksi.
7. Membantu Komisaris Utama dalam mengawasi dan menganalisis posisi neraca untuk tujuan pengendalian keuangan.
8. Memastikan Dewan Komisaris melakukan rapat Dewan Komisaris, minimal 1 kali dalam 3 bulan dan dihadiri oleh seluruh anggota komisaris.

**Rekomendasi Kepada Direksi:**

1. Penyesuaian kebijakan internal sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
2. Meningkatkan penyaluran kredit dengan prinsip kehati-hatian.
3. Memaksimalkan penyelesaian kredit bermasalah.

**4. Tugas, Tanggung Jawab, Program Kerja, dan Realisasi Program Kerja Komite**

**Tindak Lanjut Rekomendasi Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite:**

BPR Cahaya Fajar belum memiliki Komite.

**5. Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite**

**Tindak Lanjut Rekomendasi Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite:**

BPR Cahaya Fajar belum memiliki Komite.

## 6. Kepemilikan Saham Anggota Direksi dan Dewan Komisaris pada BPR

### Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR

### Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR

1.	Nama	Widodo
	Persentase Kepemilikan (%)	55,00
2.	Nama	Soenaryo Halim
	Persentase Kepemilikan (%)	45,00

Kepemilikan Saham BPR Cahaya Fajar dimiliki oleh seluruh Komisaris.

## 7. Kepemilikan Saham Anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham pada Kelompok Usaha BPR

### Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Kelompok Usaha BPR

1.	Nama	Robby Santoso
	Nama Kelompok Usaha BPR	Tidak Ada Kepemilikan Saham
	Persentase Kepemilikan (%)	0,00
	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya	0,00
2.	Nama	Feby Fernady Masura
	Nama Kelompok Usaha BPR	Tidak Ada Kepemilikan Saham
	Persentase Kepemilikan (%)	0,00
	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya	0,00
3.	Nama	Gunadi
	Nama Kelompok Usaha BPR	Tidak Ada Kepemilikan Saham
	Persentase Kepemilikan (%)	0,00
	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya	0,00

### Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Kelompok Usaha BPR

1.	Nama	Widodo
	Nama Kelompok Usaha BPR	Tidak Ada Kepemilikan Saham
	Persentase Kepemilikan (%)	0,00
	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya	0,00
2.	Nama	Soenaryo Halim
	Nama Kelompok Usaha BPR	Tidak Ada Kepemilikan Saham
	Persentase Kepemilikan (%)	0,00
	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya	0,00

#### Kepemilikan Saham Pemegang Saham BPR/BPRS

Seluruh anggota Direksi, Komisaris dan Pemegang Saham BPR Cahaya Fajar tidak memiliki saham pada kelompok usaha BPR.

#### 8. Kepemilikan Saham Anggota Direksi dan Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

##### Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain

1.	Nama	Robby Santoso
	Nama Bank/Perusahaan Lain	Tidak Ada Kepemilikan Saham
	Persentase Kepemilikan (%)	0,00
2.	Nama	Feby Fernady Masura
	Nama Bank/Perusahaan Lain	Tidak Ada Kepemilikan Saham
	Persentase Kepemilikan (%)	0,00
3.	Nama	Gunadi
	Nama Bank/Perusahaan Lain	Tidak Ada Kepemilikan Saham
	Persentase Kepemilikan (%)	0,00

##### Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

1.	Nama	Widodo
	Nama Bank/Perusahaan Lain	Tidak Ada Kepemilikan Saham

	Persentase Kepemilikan (%)	0,00
2.	Nama	Soenaryo Halim
	Nama Bank/Perusahaan Lain	Tidak Ada Kepemilikan Saham
	Persentase Kepemilikan (%)	0,00

Seluruh anggota Direksi dan Komisaris BPR Cahaya Fajar tidak memiliki saham pada Perusahaan lain.

### 9. Hubungan Keuangan Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham pada BPR

#### Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR

1.	Nama	Robby Santoso
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keuangan Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Tidak ada
2.	Nama	Feby Fernady Masura
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keuangan Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Tidak ada
3.	Nama	Gunadi
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keuangan Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Tidak ada

### Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR

1.	Nama	Widodo
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keuangan Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Tidak ada
2.	Nama	Soenaryo Halim
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keuangan Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Tidak ada

### Hubungan Keuangan Pemegang Saham pada BPR

Seluruh anggota Direksi BPR Cahaya Fajar tidak memiliki hubungan keuangan dengan Anggota Direksi Lain, Anggota Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham BPR.

## 10. Hubungan Keluarga Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham pada BPR

### Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR

1.	Nama	Robby Santoso
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keluarga Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Tidak ada
2.	Nama	Feby Fernady Masura
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota	Tidak ada

	Direksi Lain di BPR	
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keluarga Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Tidak ada
<b>3.</b>	<b>Nama</b>	<b>Gunadi</b>
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keluarga Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Tidak ada

#### Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR

<b>1.</b>	<b>Nama</b>	<b>Widodo</b>
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keluarga Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Tidak ada
<b>2.</b>	<b>Nama</b>	<b>Soenaryo Halim</b>
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keluarga Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Tidak ada

#### Hubungan Keluarga Pemegang Saham pada BPR

Seluruh anggota Direksi BPR Cahaya Fajar tidak memiliki hubungan keluarga dengan Anggota Direksi Lain, Anggota Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham BPR.

## 11. Paket/Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris

### 1.1. Gaji Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

Jumlah Direksi Penerima Gaji	<b>3 orang</b>
Jumlah Nominal Keseluruhan Gaji Direksi (Rp)	<b>Rp768.000.000</b>
Jumlah Komisaris Penerima Gaji	<b>3 orang</b>
Jumlah Nominal Keseluruhan Gaji Komisaris (Rp)	<b>Rp735.000.000</b>

### 1.2. Tunjangan Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

Jumlah Direksi Penerima Tunjangan	<b>3 orang</b>
Jumlah Nominal Keseluruhan Tunjangan Direksi (Rp)	<b>Rp436.645.422</b>
Jumlah Komisaris Penerima Tunjangan	<b>3 orang</b>
Jumlah Nominal Keseluruhan Tunjangan Komisaris (Rp)	<b>Rp15.000.000</b>

### 1.3. Tantiem Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

Jumlah Direksi Penerima Tantiem	<b>3 orang</b>
Jumlah Nominal Keseluruhan Tantiem Direksi (Rp)	<b>Rp189.000.000</b>
Jumlah Komisaris Penerima Tantiem	<b>3 orang</b>
Jumlah Nominal Keseluruhan Tantiem Komisaris (Rp)	<b>Rp122.500.000</b>

### 1.4. Kompensasi berbasis saham Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

Jumlah Direksi Penerima Kompensasi berbasis saham	<b>0 orang</b>
Jumlah Nominal Keseluruhan Kompensasi berbasis saham Direksi (Rp)	<b>Rp0</b>

Jumlah Komisaris Penerima Kompensasi berbasis saham	<b>0 orang</b>
Jumlah Nominal Keseluruhan Kompensasi berbasis saham Komisaris (Rp)	<b>Rp0</b>

#### 1.5. Remunerasi lainnya Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

Jumlah Direksi Penerima Remunerasi lainnya	<b>3 orang</b>
Jumlah Nominal Keseluruhan Remunerasi lainnya Direksi (Rp)	<b>Rp36.286.504</b>
Jumlah Komisaris Penerima Remunerasi lainnya	<b>3 orang</b>
Jumlah Nominal Keseluruhan Remunerasi lainnya Komisaris (Rp)	<b>Rp23.711.300</b>

#### 2.1. Perumahan Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

Jumlah Direksi Penerima Perumahan (Orang)	<b>1 orang</b>
Jumlah Nominal Perumahan Direksi (Rp)	<b>Rp17.000.000</b>
Jumlah Komisaris Penerima Perumahan (Orang)	<b>0 orang</b>
Jumlah Nominal Perumahan Komisaris (Rp)	<b>Rp0</b>

#### 2.2. Transportasi Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

Jumlah Direksi Penerima Transportasi (Orang)	<b>3 orang</b>
Jumlah Nominal Transportasi Direksi (Rp)	<b>Rp32.806.154</b>
Jumlah Komisaris Penerima Transportasi (Orang)	<b>2 orang</b>
Jumlah Nominal Transportasi Komisaris (Rp)	<b>Rp19.770.212</b>

### 2.3. Asuransi Kesehatan Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

Jumlah Direksi Penerima Asuransi Kesehatan (Orang)	<b>3 orang</b>
Jumlah Nominal Asuransi Kesehatan Direksi (Rp)	<b>Rp43.380.000</b>
Jumlah Komisaris Penerima Asuransi Kesehatan (Orang)	<b>3 orang</b>
Jumlah Nominal Asuransi Kesehatan Komisaris (Rp)	<b>Rp98.004.672</b>

### 2.4. Fasilitas Lain-Lainnya Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

Jumlah Direksi Penerima Fasilitas Lain-Lainnya (Orang)	<b>0 orang</b>
Jumlah Nominal Fasilitas Lain-Lainnya Direksi (Rp)	<b>Rp0</b>
Jumlah Komisaris Penerima Fasilitas Lain-Lainnya (Orang)	<b>0 orang</b>
Jumlah Nominal Fasilitas Lain-Lainnya Komisaris (Rp)	<b>Rp0</b>

## 12. Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah

### 1. Rasio (a) gaji pegawai yang tertinggi dan (b) gaji pegawai yang terendah

Rasio (a/b)	<b>4,81 : 1</b>
-------------	-----------------

### 2. Rasio (a) gaji anggota Direksi yang tertinggi dan (b) gaji anggota Direksi yang terendah

Rasio (a/b)	<b>1,10 : 1</b>
-------------	-----------------

### 3. Rasio (a) gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi dan (b) gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah

Rasio (a/b)	<b>1,56 : 1</b>
-------------	-----------------

#### 4. Rasio (a) gaji anggota Direksi yang tertinggi dan (b) gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi

Rasio (a/b)	0,67 : 1
-------------	----------

#### 5. Rasio (a) gaji anggota Direksi yang tertinggi dan (b) gaji pegawai yang tertinggi

Rasio (a/b)	1,73 : 1
-------------	----------

### 13. Pelaksanaan Rapat dalam 1 (satu) tahun

1.	Tanggal Rapat	06 Januari 2025
	Jumlah Peserta	3 orang
<b>Topik/Materi Pembahasan:</b> 1. Audit KAP 2. Perubahan Nomenklatur Perekonomian 3. Kewajiban laporan kepada eksternal 4. Pembentukan CKPN		
2.	Tanggal Rapat	07 Maret 2025
	Jumlah Peserta	3 orang
<b>Topik/Materi Pembahasan:</b>		
3.	Tanggal Rapat	11 April 2025
	Jumlah Peserta	3 orang
<b>Topik/Materi Pembahasan:</b>		
4.	Tanggal Rapat	30 Juni 2025
	Jumlah Peserta	2 orang
<b>Topik/Materi Pembahasan:</b>		
5.	Tanggal Rapat	24 Juli 2025
	Jumlah Peserta	2 orang
<b>Topik/Materi Pembahasan:</b>		
6.	Tanggal Rapat	08 Agustus 2025
	Jumlah Peserta	2 orang

<b>Topik/Materi Pembahasan:</b>		
<b>7.</b>	Tanggal Rapat	<b>09 Oktober 2025</b>
	Jumlah Peserta	<b>2 orang</b>
<b>Topik/Materi Pembahasan:</b>		
<b>8.</b>	Tanggal Rapat	<b>06 November 2025</b>
	Jumlah Peserta	<b>2 orang</b>
<b>Topik/Materi Pembahasan:</b>		
	1. Evaluasi Penerapan Fungsi Kepatuhan 2. RUPS perubahan susunan Komisaris (pengangkatan Bpk Widodo sbg KomUt) 3. Pemantauan dan Evaluasi POJK 15 tahun 2024	

Pelaksanaan rapat dihadiri seluruh Komisaris.

#### 14. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris

Kehadiran Anggota Dewan Komisaris dalam Pelaksanaan Rapat dalam 1 (satu) Tahun		
<b>1.</b>	Nama Anggota Dewan Komisaris	<b>Widodo</b>
	Frekuensi Kehadiran (Fisik)	<b>8 kali hadir</b>
	Frekuensi Kehadiran (Telekonferensi)	<b>0 kali hadir</b>
<b>2.</b>	Nama Anggota Dewan Komisaris	<b>Soenaryo Halim</b>
	Frekuensi Kehadiran (Fisik)	<b>8 kali hadir</b>
	Frekuensi Kehadiran (Telekonferensi)	<b>0 kali hadir</b>
<b>3.</b>	Nama Anggota Dewan Komisaris	<b>Soegeng Notodihardjo</b>
	Frekuensi Kehadiran (Fisik)	<b>3 kali hadir</b>
	Frekuensi Kehadiran (Telekonferensi)	<b>0 kali hadir</b>

Rapat dihadiri seluruh Komisaris.

#### 15. Jumlah Penyimpangan Intern (Internal Fraud)

1.1. Jumlah Penyimpangan Internal oleh Anggota Direksi	
Total Fraud Pada Tahun Laporan	<b>0 kasus</b>

Total Fraud Pada Tahun Sebelumnya	<b>0 kasus</b>
Telah Diselesaikan Pada Tahun Laporan	<b>0 kasus</b>
Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Laporan	<b>0 kasus</b>
Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Sebelumnya	<b>0 kasus</b>
Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Laporan	<b>0 kasus</b>
Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Sebelumnya	<b>0 kasus</b>
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum Pada Tahun Laporan	<b>0 kasus</b>

### 1.2. Jumlah Penyimpangan Internal oleh Anggota Dewan Komisaris

Total Fraud Pada Tahun Laporan	<b>0 kasus</b>
Total Fraud Pada Tahun Sebelumnya	<b>0 kasus</b>
Telah Diselesaikan Pada Tahun Laporan	<b>0 kasus</b>
Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Laporan	<b>0 kasus</b>
Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Sebelumnya	<b>0 kasus</b>
Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Laporan	<b>0 kasus</b>
Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Sebelumnya	<b>0 kasus</b>
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum Pada Tahun Laporan	<b>0 kasus</b>

### 1.3. Jumlah Penyimpangan Internal oleh Pegawai Tetap

Total Fraud Pada Tahun Laporan	<b>0 kasus</b>
--------------------------------	----------------

Total Fraud Pada Tahun Sebelumnya	<b>0 kasus</b>
Telah Diselesaikan Pada Tahun Laporan	<b>0 kasus</b>
Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Laporan	<b>0 kasus</b>
Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Sebelumnya	<b>0 kasus</b>
Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Laporan	<b>0 kasus</b>
Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Sebelumnya	<b>0 kasus</b>
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum Pada Tahun Laporan	<b>0 kasus</b>

#### 1.4. Jumlah Penyimpangan Internal oleh Pegawai Tidak Tetap

Total Fraud Pada Tahun Laporan	<b>0 kasus</b>
Total Fraud Pada Tahun Sebelumnya	<b>0 kasus</b>
Telah Diselesaikan Pada Tahun Laporan	<b>0 kasus</b>
Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Laporan	<b>0 kasus</b>
Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Sebelumnya	<b>0 kasus</b>
Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Laporan	<b>0 kasus</b>
Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Sebelumnya	<b>0 kasus</b>
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum Pada Tahun Laporan	<b>0 kasus</b>

Tidak ada penyimpangan internal di tahun 2025.

**LAPORAN TRANSPARANSI  
PELAKSANAAN TATA KELOLA  
PT. BPR CAHAYA FAJAR  
TAHUN 2025**



**JL. Karanggetas No. 142 Cirebon  
TELEPON: (0231) 248400 / (0231) 248600**

## 1. Penjelasan Umum Penerapan Tata Kelola

Informasi Umum BPR	
Nama BPR/BPRS	BPR Cahaya Fajar
Alamat	Jl Karanggetas Nomor 142 Kota Cirebon
Nomor Telepon	0231248222

### Penjelasan Umum:

Tata kelola yang baik merupakan unsur penting di dalam industri Perbankan mengingat risiko dan tantangan yang dihadapi oleh industri perbankan yang semakin meningkat. Penerapan Tata Kelola yang baik dan konsisten akan memperkuat posisi daya saing Bank, memaksimalkan nilai Bank, mengelola sumber daya dan risiko secara lebih efisien dan efektif, yang pada akhirnya akan memperkokoh kepercayaan Pemegang Saham dan masyarakat sehingga Bank dapat beroperasi dan tumbuh secara berkelanjutan dalam jangka panjang.

Untuk mewujudkan terlaksananya Prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik, maka PT. BPR Cahaya Fajar mengupayakan penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan dalam pengelolaan Bank sehari-hari dengan berlandaskan pada lima prinsip dasar, yaitu :

1. Keterbukaan(Transparency), yaitu keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan serta keterbukaan dalam pengungkapan dan penyediaan informasi yang relevan dan mudah diakses oleh pemangku kepentingan.
2. Akuntabilitas (Accountability), yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ BPR sehingga pelaksanaan tugas dilakukan secara optimal dan dapat dipertanggungjawabkan secara utuh.
3. Tanggung Jawab (Responsibility), yaitu kesesuaian pengelolaan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan nilai etika serta standar, prinsip, dan praktik yang berlaku.
4. Independensi (Independency), yaitu keadaan yang dikelola secara mandiri dan profesional serta bebas dari benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan nilai etika serta standar, prinsip, dan praktik.
5. Kewajaran (Fairness), yaitu kesetaraan, keseimbangan, dan keadilan di dalam memenuhi hak pemangku kepentingan yang timbul berdasarkan perjanjian, ketentuan peraturan perundangundangan, dan nilai etika serta standar, prinsip, dan praktik.

Ringkasan Hasil Penilaian Sendiri atas Penerapan Tata Kelola	
Peringkat Komposit Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Tata Kelola	<b>2. Baik</b>

### Penjelasan Peringkat Komposit Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Tata Kelola:

Manajemen BPR Cahaya Fajar telah melakukan pelaksanaan tata kelola yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip tata kelola. Dalam hal terdapat kelemahan pelaksanaan prinsip

tata kelola, secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen BPR.

## 2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

<b>1.</b>	<b>Nama</b>	<b>Robby Santoso</b>
	<b>Penjelasan Tugas dan Tanggung Jawab:</b>	
	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Memimpin dan mengkoordinasikan anggota direksi lainnya, guna mewujudkan visi dan misi PT. BPR cahaya Fajar.</li><li>2. Memahami dan mematuhi peraturan dari regulator (BI, OJK dan lainnya) serta aturan internal.</li><li>3. Menyelenggarakan perencanaan dan koordinasi dalam pelaksanaan tugas Direksi serta melakukan pembinaan dan pengendaliannya.</li><li>4. Menjaga agar pelaksanaan operasional sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.</li><li>5. Menyusun dan menjalankan rencana strategi dan anggaran tahunan yang sudah disetujui oleh Dewan Komisaris.</li><li>6. Penetapan kebijaksanaan untuk melaksanakan pengurusan dan pengelolaan berdasarkan kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris.</li><li>7. Penyusunan dan penyampaian Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran kepada Dewan Komisaris yang meliputi kebijaksanaan di bidang organisasi, perencanaan perkreditan, keuangan, kepegawaian umum dan pengawasan untuk mendapatkan pengesahan.</li><li>8. Penyusunan dan penyampaian laporan tahunan kepada Dewan Komisaris untuk mendapatkan pengesahan.</li><li>9. Melaksanakan pengawasan terhadap penerapan APU PPT dan PPSPM atau pengawasan terhadap serangkaian pengaturan dan proses pelaksanaan upaya pencegahan dan pemberantasan TPPU dan TPPT.</li><li>10. Bersama Direksi lain yang berada dibawahnya menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan rencana kerja terhadap rencana kerja kepada OJK.</li><li>11. Memastikan terlaksananya penerapan Tata Kelola yang baik pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh jajaran organisasi.</li><li>12. Menyetujui kebijakan dan prosedur perkreditan serta melakukan pengawasan aktif terhadap pelaksanaan kebijakan perkreditan.</li><li>13. Melakukan pengawasan terhadap perbaikan/ penyelesaian temuan hasil pemeriksaan otoritas pengawasan Bank atau pemerintah.</li><li>14. Melakukan pembinaan dan menilai prestasi kerja seluruh pegawai yang berada dibawahnya.</li><li>15. Memimpin dan mengkoordinir SKAI dan pelaksanaan pengawasan kegiatan operasional bank.</li><li>16. Membuat keputusan dalam hal memberikan jumlah pinjaman kepada calon nasabah yang masuk dalam batas wewenang.</li></ol>	
<b>2.</b>	<b>Nama</b>	<b>Feby Fernady Masura</b>
	<b>Penjelasan Tugas dan Tanggung Jawab:</b>	
	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Memahami dan mematuhi peraturan dari regulator (BI, OJK dan lainnya) serta segala aturan yang dibuat oleh perusahaan.</li></ol>	

2. Bertanggungjawab atas penghimpunan dana dan penyaluran dana kepada masyarakat.
3. Menetapkan, memutuskan, dan menyetujui, serta memerintahkan pembayaran dalam rangka realisasi kredit.
4. Menetapkan cara-cara penagihan kembali atas kredit yang telah diberikan kepada debitur yang menunggak secara efektif dan efisien.
5. Bertanggung jawab atas pengaduan, penanganan, dan penyelesaian keluhan/ pengaduan nasabah.
6. Memantau kondisi internal (Kekuatan dan kelemahan bank) dan perkembangan kondisi eksternal yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi strategi usaha bank.
7. Bersama Direksi lain menyusun dan Menyampaikan laporan pelaksanaan rencana kerja terhadap rencana kerja kepada Otoritas jasa keuangan.
8. Menyetujui kebijakan dan prosedur perkreditan serta melakukan pengawasan aktif terhadap pelaksanaan kebijakan perkreditan.
9. Melakukan pengawasan terhadap perbaikan/ penyelesaian temuan hasil pemeriksaan otoritas pengawasan Bank, pemerintah dan audit internal.
10. Melakukan pembinaan dan menilai prestasi kerja seluruh pegawai yang berada dibawahnya.
11. Melaksanakan koordinasi penyusunan, perencanaan & pengendalian, evaluasi serta pembinaan thd kegiatan Operasional.
12. Mengawasi & menganalisis posisi neraca utk tujuan pengendalian keuangan.
13. Meneliti, memeriksa & menandatangani persetujuan biaya.
14. Melaksanakan pengawasan terhadap penerapan APU PPT dan PPSPM/ pengawasan terhadap serangkaian pengaturan dan proses pelaksanaan upaya pencegahan dan pemberantasan TPPU dan TPPT.

3.

Nama

Gunadi

**Penjelasan Tugas dan Tanggung Jawab:**

1. Memahami & mematuhi peraturan dr regulator & internal.
2. Memantau & menjaga kepatuhan BPR thd seluruh komitmen yg dibuat.
3. Penyelenggaraan tata kerja & prosedur unit kerja.
4. Pengawas & pengarah serta evaluator & pengendalian seluruh kegiatan operasional sesuai dengan regulator.
5. Bertanggung jawab atas pengaduan, penanganan & penyelesaian pengaduan nasabah.
6. Bersama Direksi lain menyusun & menyampaikan lap pelaksanaan rencana kerja thd rencana kerja kepada OJK.
7. Mengawasi & menganalisis posisi neraca utk tujuan pengendalian keuangan.
8. Melakukan pengawasan thd perbaikan / penyelesaian temuan pemeriksaan.
9. Mengusulkan / merekomendasikan kpd DirUt utk melakukan promosi, mutasi & demosi karyawan.
10. Meneliti, memeriksa & menandatangani persetujuan biaya.
11. Menetapkan langkah untuk memastikan BPR telah memenuhi regulator dalam rangka pelaksanaan prinsip kehati-hatian termasuk memberi pendapat yg berbeda bila terdapat kebijakan yg menyimpang dari regulator.
12. Memastikan terlaksananya sosialisasi & pelatihan berkelanjutan kpd unit kerja mengenai peraturan OJK terkini & peraturan lain yang relevan.

13. Melaporkan kpd Direksi lainnya & Komisaris secara tertulis terkait pelanggaran kepatuhan yang dilakukan oleh pegawai BPR.
14. Melaporkan kpd Dewan Komisaris secara tertulis terkait pelanggaran kepatuhan yang dilakukan oleh Direksi.
15. Memastikan seluruh karyawan BPR memahami & mengimplementasikan manajemen risiko.
16. Bersama Direksi lain menyusun & menyampaikan laporan pelaksanaan rencana kerja terhadap rencana kerja kepada OJK.
17. Melakukan pengawasan thd perbaikan/ penyelesaian temuan hasil pemeriksaan otoritas pengawasan Bank / Pemerintah.
18. Melaksanakan pengawasan terhadap penerapan APU PPT dan PPSPM / pengawasan terhadap serangkaian pengaturan dan proses pelaksanaan upaya pencegahan dan pemberantasan TPPU dan TPPT.
19. Melakukan pembinaan dan menilai prestasi kerja seluruh pegawai yang berada dibawahnya.

#### Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris:

1. Penyelesaian kredit bermasalah.
2. Pengkinian Ketentuan Internal sesuai Regulator yang berlaku.
3. Penerapan POJK terbaru terhadap pelaksanaan kegiatan operasional Bank.

### 3. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris

1.	Nama	Widodo
<p><b>Penjelasan Tugas dan Tanggung Jawab:</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Memastikan terselenggaranya pelaksanaan penerapan tata kelola dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.</li><li>2. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Anggota Direksi dan memberikan nasihat kepada Direksi.</li><li>3. Mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis.</li><li>4. Menyelenggarakan rapat Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 bulan dan dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris baik dihadiri langsung, telekonferensi atau video konferensi dengan minimal agenda rapat sesuai POJK.</li><li>5. Menyelenggarakan rapat dengan agenda penetapan rencana bisnis BPR wajib dilaksanakan minimal 1 (satu) kali dalam setahun dan wajib dihadiri secara langsung oleh seluruh anggota dewan komisaris.</li><li>6. Melaksanakan pengawasan terhadap penerapan APU PPT dan PPPSPM atau pengawasan terhadap serangkaian pengaturan dan proses pelaksanaan upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme (TPPU dan TPPT).</li><li>7. Memimpin jalannya Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan.</li><li>8. Menyetujui kebijakan dan prosedur perkreditan serta melakukan pengawasan aktif terhadap pelaksanaan kebijakan perkreditan.</li><li>9. Memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari SKAI, auditor eksternal, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan atau pengawasan otoritas lainnya.</li><li>10. Menyusun dan melakukan evaluasi secara berkala kebijakan remunerasi dan nominasi bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, dan mengusulkan</li></ol>		

penetapan kebijakan dimaksud kepada RUPS.

11. Memastikan Direksi menyusun kebijakan dan prosedur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
12. Melakukan pengawasan atas penerapan kebijakan dan prosedur pengendalian internal dalam proses pelaporan keuangan Bank.

2.	Nama	Soenaryo Halim
----	------	----------------

**Penjelasan Tugas dan Tanggung Jawab:**

1. Melaksanakan tanggung jawabnya sebagai Komisaris dalam membantu tugas Komisaris Utama.
2. Membantu Komisaris Utama dalam memastikan terselenggaranya pelaksanaan penerapan tata kelola dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
3. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Anggota Direksi dan memberikan nasihat kepada Direksi.
4. Mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis.
5. Membantu Komisaris Utama dalam melakukan pengawasan terhadap perbaikan/ penyelesaian temuan hasil pemeriksaan otoritas pengawasan Bank atau pemerintah.
6. Memberikan penilaian dan evaluasi atas neraca dan perhitungan laba/rugi tahunan, serta laporan-laporan berkala lainnya yang disampaikan oleh Direksi.
7. Membantu Komisaris Utama dalam mengawasi dan menganalisis posisi neraca untuk tujuan pengendalian keuangan.
8. Memastikan Dewan Komisaris melakukan rapat Dewan Komisaris, minimal 1 kali dalam 3 bulan dan dihadiri oleh seluruh anggota komisaris.

**Rekomendasi Kepada Direksi:**

1. Penyesuaian kebijakan internal sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
2. Meningkatkan penyaluran kredit dengan prinsip kehati-hatian.
3. Memaksimalkan penyelesaian kredit bermasalah.

**4. Tugas, Tanggung Jawab, Program Kerja, dan Realisasi Program Kerja Komite**

**Tindak Lanjut Rekomendasi Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite:**

BPR Cahaya Fajar belum memiliki Komite.

**5. Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite**

**Tindak Lanjut Rekomendasi Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite:**

BPR Cahaya Fajar belum memiliki Komite.

## 6. Kepemilikan Saham Anggota Direksi dan Dewan Komisaris pada BPR

### Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR

### Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR

1.	Nama	Widodo
	Persentase Kepemilikan (%)	55,00
2.	Nama	Soenaryo Halim
	Persentase Kepemilikan (%)	45,00

Kepemilikan Saham BPR Cahaya Fajar dimiliki oleh seluruh Komisaris.

## 7. Kepemilikan Saham Anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham pada Kelompok Usaha BPR

### Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Kelompok Usaha BPR

1.	Nama	Robby Santoso
	Nama Kelompok Usaha BPR	Tidak Ada Kepemilikan Saham
	Persentase Kepemilikan (%)	0,00
	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya	0,00
2.	Nama	Feby Fernady Masura
	Nama Kelompok Usaha BPR	Tidak Ada Kepemilikan Saham
	Persentase Kepemilikan (%)	0,00
	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya	0,00
3.	Nama	Gunadi
	Nama Kelompok Usaha BPR	Tidak Ada Kepemilikan Saham
	Persentase Kepemilikan (%)	0,00
	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya	0,00

### Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Kelompok Usaha BPR

1.	Nama	Widodo
	Nama Kelompok Usaha BPR	Tidak Ada Kepemilikan Saham
	Persentase Kepemilikan (%)	0,00
	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya	0,00
2.	Nama	Soenaryo Halim
	Nama Kelompok Usaha BPR	Tidak Ada Kepemilikan Saham
	Persentase Kepemilikan (%)	0,00
	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya	0,00

#### Kepemilikan Saham Pemegang Saham BPR/BPRS

Seluruh anggota Direksi, Komisaris dan Pemegang Saham BPR Cahaya Fajar tidak memiliki saham pada kelompok usaha BPR.

#### 8. Kepemilikan Saham Anggota Direksi dan Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

##### Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain

1.	Nama	Robby Santoso
	Nama Bank/Perusahaan Lain	Tidak Ada Kepemilikan Saham
	Persentase Kepemilikan (%)	0,00
2.	Nama	Feby Fernady Masura
	Nama Bank/Perusahaan Lain	Tidak Ada Kepemilikan Saham
	Persentase Kepemilikan (%)	0,00
3.	Nama	Gunadi
	Nama Bank/Perusahaan Lain	Tidak Ada Kepemilikan Saham
	Persentase Kepemilikan (%)	0,00

##### Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

1.	Nama	Widodo
	Nama Bank/Perusahaan Lain	Tidak Ada Kepemilikan Saham

	Persentase Kepemilikan (%)	0,00
2.	Nama	Soenaryo Halim
	Nama Bank/Perusahaan Lain	Tidak Ada Kepemilikan Saham
	Persentase Kepemilikan (%)	0,00

Seluruh anggota Direksi dan Komisaris BPR Cahaya Fajar tidak memiliki saham pada Perusahaan lain.

### 9. Hubungan Keuangan Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham pada BPR

#### Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR

1.	Nama	Robby Santoso
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keuangan Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Tidak ada
2.	Nama	Feby Fernady Masura
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keuangan Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Tidak ada
3.	Nama	Gunadi
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keuangan Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Tidak ada

### Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR

1.	Nama	Widodo
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keuangan Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Tidak ada
2.	Nama	Soenaryo Halim
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keuangan Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Tidak ada

### Hubungan Keuangan Pemegang Saham pada BPR

Seluruh anggota Direksi BPR Cahaya Fajar tidak memiliki hubungan keuangan dengan Anggota Direksi Lain, Anggota Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham BPR.

## 10. Hubungan Keluarga Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham pada BPR

### Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR

1.	Nama	Robby Santoso
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keluarga Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Tidak ada
2.	Nama	Feby Fernady Masura
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota	Tidak ada

	Direksi Lain di BPR	
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keluarga Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Tidak ada
<b>3.</b>	Nama	<b>Gunadi</b>
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keluarga Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Tidak ada

#### Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR

<b>1.</b>	Nama	<b>Widodo</b>
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keluarga Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Tidak ada
<b>2.</b>	Nama	<b>Soenaryo Halim</b>
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keluarga Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Tidak ada

#### Hubungan Keluarga Pemegang Saham pada BPR

Seluruh anggota Direksi BPR Cahaya Fajar tidak memiliki hubungan keluarga dengan Anggota Direksi Lain, Anggota Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham BPR.

## 11. Paket/Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris

### 1.1. Gaji Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

Jumlah Direksi Penerima Gaji	3 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Gaji Direksi (Rp)	Rp768.000.000
Jumlah Komisaris Penerima Gaji	3 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Gaji Komisaris (Rp)	Rp735.000.000

### 1.2. Tunjangan Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

Jumlah Direksi Penerima Tunjangan	3 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Tunjangan Direksi (Rp)	Rp436.645.422
Jumlah Komisaris Penerima Tunjangan	3 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Tunjangan Komisaris (Rp)	Rp15.000.000

### 1.3. Tantiem Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

Jumlah Direksi Penerima Tantiem	3 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Tantiem Direksi (Rp)	Rp189.000.000
Jumlah Komisaris Penerima Tantiem	3 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Tantiem Komisaris (Rp)	Rp122.500.000

### 1.4. Kompensasi berbasis saham Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

Jumlah Direksi Penerima Kompensasi berbasis saham	0 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Kompensasi berbasis saham Direksi (Rp)	Rp0

Jumlah Komisaris Penerima Kompensasi berbasis saham	<b>0 orang</b>
Jumlah Nominal Keseluruhan Kompensasi berbasis saham Komisaris (Rp)	<b>Rp0</b>

#### 1.5. Remunerasi lainnya Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

Jumlah Direksi Penerima Remunerasi lainnya	<b>3 orang</b>
Jumlah Nominal Keseluruhan Remunerasi lainnya Direksi (Rp)	<b>Rp36.286.504</b>
Jumlah Komisaris Penerima Remunerasi lainnya	<b>3 orang</b>
Jumlah Nominal Keseluruhan Remunerasi lainnya Komisaris (Rp)	<b>Rp23.711.300</b>

#### 2.1. Perumahan Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

Jumlah Direksi Penerima Perumahan (Orang)	<b>1 orang</b>
Jumlah Nominal Perumahan Direksi (Rp)	<b>Rp17.000.000</b>
Jumlah Komisaris Penerima Perumahan (Orang)	<b>0 orang</b>
Jumlah Nominal Perumahan Komisaris (Rp)	<b>Rp0</b>

#### 2.2. Transportasi Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

Jumlah Direksi Penerima Transportasi (Orang)	<b>3 orang</b>
Jumlah Nominal Transportasi Direksi (Rp)	<b>Rp32.806.154</b>
Jumlah Komisaris Penerima Transportasi (Orang)	<b>2 orang</b>
Jumlah Nominal Transportasi Komisaris (Rp)	<b>Rp19.770.212</b>

### 2.3. Asuransi Kesehatan Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

Jumlah Direksi Penerima Asuransi Kesehatan (Orang)	<b>3 orang</b>
Jumlah Nominal Asuransi Kesehatan Direksi (Rp)	<b>Rp43.380.000</b>
Jumlah Komisaris Penerima Asuransi Kesehatan (Orang)	<b>3 orang</b>
Jumlah Nominal Asuransi Kesehatan Komisaris (Rp)	<b>Rp98.004.672</b>

### 2.4. Fasilitas Lain-Lainnya Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

Jumlah Direksi Penerima Fasilitas Lain-Lainnya (Orang)	<b>0 orang</b>
Jumlah Nominal Fasilitas Lain-Lainnya Direksi (Rp)	<b>Rp0</b>
Jumlah Komisaris Penerima Fasilitas Lain-Lainnya (Orang)	<b>0 orang</b>
Jumlah Nominal Fasilitas Lain-Lainnya Komisaris (Rp)	<b>Rp0</b>

## 12. Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah

### 1. Rasio (a) gaji pegawai yang tertinggi dan (b) gaji pegawai yang terendah

Rasio (a/b)	<b>0,00 : 1</b>
-------------	-----------------

### 2. Rasio (a) gaji anggota Direksi yang tertinggi dan (b) gaji anggota Direksi yang terendah

Rasio (a/b)	<b>0,00 : 1</b>
-------------	-----------------

### 3. Rasio (a) gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi dan (b) gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah

Rasio (a/b)	<b>0,00 : 1</b>
-------------	-----------------

#### 4. Rasio (a) gaji anggota Direksi yang tertinggi dan (b) gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi

Rasio (a/b)	0,00 : 1
-------------	----------

#### 5. Rasio (a) gaji anggota Direksi yang tertinggi dan (b) gaji pegawai yang tertinggi

Rasio (a/b)	0,00 : 1
-------------	----------

### 13. Pelaksanaan Rapat dalam 1 (satu) tahun

1.	Tanggal Rapat	06 Januari 2025
	Jumlah Peserta	3 orang
<b>Topik/Materi Pembahasan:</b> 1. Audit KAP 2. Perubahan Nomenklatur Perekonomian 3. Kewajiban laporan kepada eksternal 4. Pembentukan CKPN		
2.	Tanggal Rapat	07 Maret 2025
	Jumlah Peserta	3 orang
<b>Topik/Materi Pembahasan:</b>		
3.	Tanggal Rapat	11 April 2025
	Jumlah Peserta	3 orang
<b>Topik/Materi Pembahasan:</b>		
4.	Tanggal Rapat	30 Juni 2025
	Jumlah Peserta	2 orang
<b>Topik/Materi Pembahasan:</b>		
5.	Tanggal Rapat	24 Juli 2025
	Jumlah Peserta	2 orang
<b>Topik/Materi Pembahasan:</b>		
6.	Tanggal Rapat	08 Agustus 2025
	Jumlah Peserta	2 orang

<b>Topik/Materi Pembahasan:</b>		
<b>7.</b>	Tanggal Rapat	<b>09 Oktober 2025</b>
	Jumlah Peserta	<b>2 orang</b>
<b>Topik/Materi Pembahasan:</b>		
<b>8.</b>	Tanggal Rapat	<b>06 November 2025</b>
	Jumlah Peserta	<b>2 orang</b>
<b>Topik/Materi Pembahasan:</b>		
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Evaluasi Penerapan Fungsi Kepatuhan</li> <li>2. RUPS perubahan susunan Komisaris (pengangkatan Bpk Widodo sbg KomUt)</li> <li>3. Pemantauan dan Evaluasi POJK 15 tahun 2024</li> </ol>	

Pelaksanaan rapat dihadiri seluruh Komisaris.

#### 14. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris

Kehadiran Anggota Dewan Komisaris dalam Pelaksanaan Rapat dalam 1 (satu) Tahun		
<b>1.</b>	Nama Anggota Dewan Komisaris	<b>Widodo</b>
	Frekuensi Kehadiran (Fisik)	<b>8 kali hadir</b>
	Frekuensi Kehadiran (Telekonferensi)	<b>0 kali hadir</b>
<b>2.</b>	Nama Anggota Dewan Komisaris	<b>Soenaryo Halim</b>
	Frekuensi Kehadiran (Fisik)	<b>8 kali hadir</b>
	Frekuensi Kehadiran (Telekonferensi)	<b>0 kali hadir</b>
<b>3.</b>	Nama Anggota Dewan Komisaris	<b>Soegeng Notodihardjo</b>
	Frekuensi Kehadiran (Fisik)	<b>3 kali hadir</b>
	Frekuensi Kehadiran (Telekonferensi)	<b>0 kali hadir</b>

Rapat dihadiri seluruh Komisaris.

#### 15. Jumlah Penyimpangan Intern (Internal Fraud)

1.1. Jumlah Penyimpangan Internal oleh Anggota Direksi	
Total Fraud Pada Tahun Laporan	<b>0 kasus</b>

Total Fraud Pada Tahun Sebelumnya	<b>0 kasus</b>
Telah Diselesaikan Pada Tahun Laporan	<b>0 kasus</b>
Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Laporan	<b>0 kasus</b>
Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Sebelumnya	<b>0 kasus</b>
Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Laporan	<b>0 kasus</b>
Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Sebelumnya	<b>0 kasus</b>
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum Pada Tahun Laporan	<b>0 kasus</b>

### 1.2. Jumlah Penyimpangan Internal oleh Anggota Dewan Komisaris

Total Fraud Pada Tahun Laporan	<b>0 kasus</b>
Total Fraud Pada Tahun Sebelumnya	<b>0 kasus</b>
Telah Diselesaikan Pada Tahun Laporan	<b>0 kasus</b>
Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Laporan	<b>0 kasus</b>
Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Sebelumnya	<b>0 kasus</b>
Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Laporan	<b>0 kasus</b>
Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Sebelumnya	<b>0 kasus</b>
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum Pada Tahun Laporan	<b>0 kasus</b>

### 1.3. Jumlah Penyimpangan Internal oleh Pegawai Tetap

Total Fraud Pada Tahun Laporan	<b>0 kasus</b>
--------------------------------	----------------

Total Fraud Pada Tahun Sebelumnya	<b>0 kasus</b>
Telah Diselesaikan Pada Tahun Laporan	<b>0 kasus</b>
Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Laporan	<b>0 kasus</b>
Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Sebelumnya	<b>0 kasus</b>
Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Laporan	<b>0 kasus</b>
Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Sebelumnya	<b>0 kasus</b>
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum Pada Tahun Laporan	<b>0 kasus</b>

#### 1.4. Jumlah Penyimpangan Internal oleh Pegawai Tidak Tetap

Total Fraud Pada Tahun Laporan	<b>0 kasus</b>
Total Fraud Pada Tahun Sebelumnya	<b>0 kasus</b>
Telah Diselesaikan Pada Tahun Laporan	<b>0 kasus</b>
Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Laporan	<b>0 kasus</b>
Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Sebelumnya	<b>0 kasus</b>
Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Laporan	<b>0 kasus</b>
Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Sebelumnya	<b>0 kasus</b>
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum Pada Tahun Laporan	<b>0 kasus</b>

Tidak ada penyimpangan internal di tahun 2025.

## 16. Permasalahan Hukum yang Dihadapi

### 1.1. Permasalahan Hukum yang Telah Selesai

Permasalahan Hukum Perdata yang Telah Selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	<b>0 kasus</b>
---	----------------

Permasalahan Hukum Pidana yang Telah Selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	<b>0 kasus</b>
--	----------------

### 1.2. Permasalahan Hukum yang Dalam Proses Penyelesaian

Permasalahan Hukum Perdata yang Dalam Proses Penyelesaian	<b>0 kasus</b>
---	----------------

Permasalahan Hukum Pidana yang Dalam Proses Penyelesaian	<b>0 kasus</b>
--	----------------

Tidak ada permasalahan hukum di tahun 2025.

## 17. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

Tidak ada transaksi yang mengandung benturan kepentingan di tahun 2025.

## 18. Pemberian Dana untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik

Tidak ada Pemberian Dana untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik di tahun 2025.

Demikian Laporan ini dibuat yang menjadi transparansi PT. BPR Cahaya Fajar untuk tahun 2025. Demikian kami sampaikan atas perhatian serta kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Kota Cirebon, 12 Maret 2026

**PT. BPR Cahaya Fajar**



**Robby Santoso**  
Direktur Utama



**Widodo**  
Komisaris Utama